



**RENCANA KERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
Jl.A.Yani Km. 4 Kec Kel. Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan



## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut, semakin kompleks pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini nampak bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 selain didasarkan oleh hal di atas juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah,

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan Pedoman dalam penyusunan Perencanaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paringin,

2021

Plt. Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Balangan

  
**RAHMADIAH, ST, MT**  
NIP. 19760309 200604 2 007

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

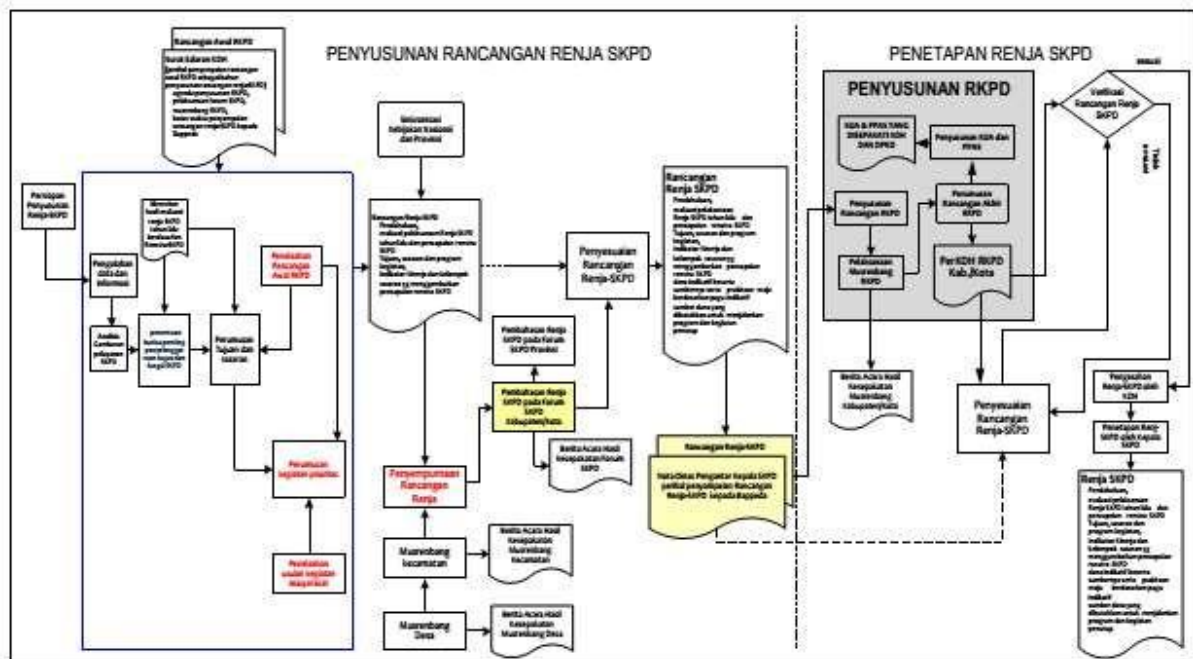
Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja perangkat daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja perangkat daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja perangkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun , mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja perangkat daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif.

### 1.1.1 Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah Kabupaten



Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan

awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja perangkat daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala perangkat daerah menetapkan Renja perangkat daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap perangkat daerah dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan perangkat daerah harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi serta perumahan)
- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Balangan harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

## 1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
  9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Balangan pada Tahun 2022 serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan di bidang jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung dan penataan ruang, serta

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 mengacu pada APBD tahun 2021 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa



kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta program dan kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

**BAB V PENUTUP**

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan 2021-2026.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020**

Sebelum berubah nama numenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 25 (dua puluh lima) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Balangan pada tahun 2020. Pemampatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga dan penataan ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Balangan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan

outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan pada tahun 2020, termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)\***  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan**

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
Sebelum Penggabungan										
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Program Pelayanan adm perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah jasa kantor yang dibayar (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm. Keuangan yang dibayar (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat pegawai yang dilaksanakan (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan	72	48	12	12	100	12	72	100,00

	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	40	5	2	2	100	2	9	22,50
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	16	15	5	5	100	0	20	125,00
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	12	3	1	1	100	0	4	33,33
	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang tersedia (Pkt)	18	11	2	2	100	3	16	88,89
	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang dipelihara (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia (%)	100	100	0	0	0	0	100	100,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kemampuan sumber daya SOPD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (Bln)	72	48	12	12	100	12	72	100,00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dok)	30	20	5	5	100	5	30	100,00
	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>Persentase panjang jaringan drainase yang baik</b>	<b>89,16</b>	<b>86,61</b>	<b>88,53</b>	<b>66,53</b>	<b>75,15</b>	<b>89,16</b>	<b>89,16</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun (m)	91.789	96.889	6.400	5.222	81,59375	9.500	111.611	121,60
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dipelihara (m)	18.707	4.000					4.000	21,38
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Luas lahan yang terairi irigasi (%)</b>	<b>54</b>	<b>46,99</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun (Lokasi)	42	19	6	6	100	7	32	76,19
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang direhabilitasi (Lokasi)	18	5	3	3	100	5	13	72,22
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Irigasi dan Pengairan	Dokumen monitoring (Dok)	4	1	1	1	100	1	3	75,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (m)	13.377	6.822	2.250	2.250	100		9.072	67,82
	Peningkatan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (m)	8.000	1.366	564	564	100	1.250	3.180	39,75
	<b>Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku</b>	<b>Debit air baku (Ltr/dtk)</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00</b>
	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Panjang pipa suplay air baku (km)	15,12	11,21	755,2	755,2	100	1	767	5.072,75

		<b>Program Pengaturan Jasa Kontruksi</b>	<b>Persentase Pengaturan Jasa Kontruksi</b>	100	48	50	50	100	30	128	128,00
		Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Per-UU Jasa Kontruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (Blh)	60	48	50	50	100	30	128	213,33
		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Teknis NSPK Rencana Tata Ruang</b>	91	44	75	0	0	5	45	49,45
		Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis kawasan (Dok)	8	4	1	1	100	1	6	75,00
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah rapat BKPRD (Kali)	30	15	5	5	100	5	25	83,33
		Revisi rencana tata ruang	Jumlah identifikasi bahan revisi RTRW yang tersusun (Dok)	4	1	2	1	50	1	3	75,00
		Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (Dok)	8	5	4	6	150	2	13	162,50
		Penyusunan rencana rinci tata ruang	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang (Dok)	7	2	2	1	50	1	4	57,14
		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih</b>	<b>Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih</b>	100	94,76	97,16	97,16	100	100	100	100,00
		Pengembangan jaringan perpipaan distribusi air minum	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun (m)	177.592	124.623	4.617	4.617	100	15.000	144.240	81,22
		Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	Jumlah sambungan rumah (SR)	3.701	2.710	0	0	0		2.710	73,22
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Persentase panjang jalan yang dipelihara	5	5	8,12	8,12	100	5	5	100,00
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	8,02	8,50	0,25	0,25	100	2	11	134,04
		<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan</b>	<b>Persentase panjang jembatan yang dipelihara</b>	3	2	3,59	3,59	100	5	12	386,33
		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (m)	350	338	7	7	100	2	347	99,14
		<b>Program Pembangunan Jalan</b>	<b>Persentase panjang Jalan yang dibangun</b>	40	30,57	34,78	34,78	100	5	70	175,88
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	13,29	6,5	0,56	0,56	100	2,5	10	71,93
		<b>Program Peningkatan Jalan</b>	<b>Persentase panjang jalan yang ditingkatkan</b>	40	37,8	3,36	3,29	97,92	40	81	202,73
		Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	48,55	86,35	12,37	11,86	95,88	29	127	262,02
		Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	55	38,1	10,24	10,24	100,00			0,00
		<b>Program Pembangunan Jembatan</b>	<b>Persentase Panjang jembatan dalam kondisi baik</b>	42,85	47,91	1,19	1,19	100	50	50	116,69
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (m)	7.535,65	7.540	90,00	90,00	100	275	7.905	104,90
		<b>Program Pembangunan Jalan Lingkungan</b>	<b>Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik</b>	42,74	29,68	33,23	20	60,19	42,74	92	216,24
		Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun (m)	91.259	24.795					24.795	27,17
		Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan (m)	24.123	12.323	2.000	1.950	97,5	2.000	16.273	67,46
		<b>Program Peningkatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase sarana jasa konstruksi yang terpenuhi</b>	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara (Unit)	6	6	6	6	100	6	6	100,00
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Dokumen perencanaan infrastruktur</b>	45	25	8	6	75	8	39	86,67
		Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Dokumen perencanaan (Dok)	33	36	10	2	20	5	43	130,30
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monitoring (Dok)	12	9	3	0	0	3	12	100,00

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase Infrastruktur sanitasi yang baik	100	79,41	92,96	130	139,8450947	100	100	100,00
	Penyediaan Prasarana Sanitasi (DAK)	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun (unit)	50	81	23	0	0		81	162,00
	Penyediaan Prasarana Sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun (unit)	58	27	10	17	170	10	54	93,10
	Penyediaan Sarana Sanitasi	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia (unit)	4	2	20	0	0	1	3	75,00
	Program Pemeliharaan Sungai	Persentase panjang Tebing sungai rawan longsor yang	35	29,82	45	45	100	35	110	313,77
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang sungai/kali yang dibersihkan/dikeruk (km)	70,25	93	66	66	100	20	179	254,09
	Perkuatan Tebing Sungai	Panjang tebing sungai yang diperkuat (m)	15.240	28.850	2.300	2.300	100	1.200	32.350	212,27
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Persentase bangunan Publik dalam Kondisi Baik	80	76,84	77	58	75,32	80	80	100,00
	Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dibangun (unit)	39	24	3	2	66,67	3	29	74,36
	Rehab/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit)	47	30	2	3	150,00	15	48	102,13
	Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang dibangun (unit)	19	12	3	5	166,67	3	20	105,26
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH	2,2	1,3	2	2	95	2	5,3	240,91
	Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen perencanaan (dok)	8	6	1	1	100	2	9	112,50
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH kawasan perkotaan terbangun (ha)	12	12	4,6	0,1	2	12	24	200,83
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki tenaga	100	45	50	50	100	5	100	100,00
	Diklat Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah sertifikasi bagi penyedia jasa konstruksi (kai)	100	45	50	50	100	3	98	98,00
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan dokumen teknis NSPK	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyediaan bahan media sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur	Jumlah bahan media sosialisasi (Jenis)	4	8	2	2	100	4	14	350,00
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	5	4	2	2	100	1	7	700,00

## 2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Balangan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan

NO	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyek si	Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n- 2)	Tahun 2018 (thn n- 1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n- 2)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sebelum Penggabungan (Berubah Nama Numenklatur)													
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	60		30	32	35	38	37,81	40,32	44,51	48,30		
2	Persentase kinerja sistem irigasi	70		45	48	50	52	45,91	49,01	52,67	55,88		
3	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	81,77		88,85	91,63	94,41	97,19	83,23	94,76	95,45	80,59		

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	38	48,30	127,11
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	52	55,88	107,46
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi	97,19	80,59	82,92
	Persentase prasarana MCK yang berfungsi	96,48	95,09	98,56
	Persentase jaringan drainase dalam keadaan baik	88,53	88,23	99,66
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100	100	100
	Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	65	64,61	99,4

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut empat indikator dinyatakan “sangat tinggi” dan satu indikator dinyatakan “tinggi” dengan capaiannya rata-rata  $\geq 103,14\%$  (sangat tinggi).

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

#### Sasaran 1

##### Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	127,17	38	48,30	127,11	120,75
Rata-rata Capaian				127,11	120,75

Sumber Data : Dinas PUPR

Total panjang jalan kabupaten balangan pada tahun 2020 sebesar 672,253 km dengan rincian panjang kondisi jalan kabupaten yang baik 280,114 km, sedang 44,608 km. Total panjang jalan dalam kategori kondisi mantap sebesar 324,722 km sehingga realisasi pencapaian target atas indikator Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 48,30% dari target sebesar 38%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian **Sangat Tinggi**. Adapun total panjang jalan Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sebesar 672,253 km dengan rincian panjang kondisi jalan kabupaten yang baik 280,114 km, dan sedang 44,608 km. Total panjang jalan dalam kategori kondisi mantap sebesar 324,722 km (berdasarkan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan) sehingga realisasi pencapaian target atas indikator Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 48,30% dari target sebesar 38%. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 127,11% dengan kategori capaian indikator **Sangat Tinggi** dan dibandingkan dengan capaian kinerja 2019 sebesar 127,17% mengalami penurunan sebesar (-0,07%) disebabkan



adanya paket pekerjaan yang tidak terealisasi. Dan capaian 2020 terhadap 2021 adalah sebesar 120,75%.

### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- 1) Rencana kinerja sesuai dengan pagu anggaran
- 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

### Permasalahan/Hambatan

- 1) Struktur tanah yang relatif kurang stabil
- 2) Lahan atau lokasi tempat pekerjaan bermasalah

### Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Penguatan struktur tanah dengan membuat siring pada samping jalan.
- 2) Bagi jalan-jalan yang mempunyai struktur tanah yang relatif kurang stabil bisa dilakukan dengan melakukan pengecoran pada jalan tersebut.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam hal pembebasan lahan baik dengan masyarakat sekitar pembangunan jalan maupun dengan stakeholder terkait.

**Tabel Efisiensi Anggaran**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Relevan (Ya/Tdk)	Penjelasan
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Persentase Panjang jalan yang dipelihara	a. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara	1.489.208.840	Ya	
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Persentase Panjang jembatan yang dipelihara	a. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	2.440.022.560	Ya	
		Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	a. Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	2.339.634.500	Ya	
		Program Peningkatan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	a. Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	33.427.740.400	Ya	
				b. Peningkatan jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	21.463.465.000	Ya	
Program Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	a. Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	13.449.901.000	Ya			

## Sasaran 2

### Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase irigasi dalam kondisi baik	105,34	52	55,88	107,46	103,48
Rata-rata Capaian				107,46	103,48

Sumber Data : Dinas PUPR

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pencapaian target atas indikator Persentase irigasi dalam kondisi mantap tersebut adalah sebesar 55,88% dari target sebesar 52%. Dengan rincian panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 25.535 m dan kondisi sedang 14.700 m dari total panjang saluran irigasi 71.046 m, sementara panjang saluran irigasi rawa dalam kondisi baik sebesar 7.860 m dan kondisi sedang 825 m dari total panjang saluran irigasi rawa 16.500 m. Dengan total panjang saluran irigasi permukaan sebesar 87.547 m. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- 1) Rencana kinerja sesuai dengan pagu anggaran
- 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

#### **Permasalahan/Hambatan**

- 1) Curah hujan yang tinggi
- 2) Material berasal dari luar propinsi

#### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

- 1) Mengatur waktu pelaksanaan seefisien mungkin sehingga faktor cuaca dapat di minimalisir
- 2) Pemesanan material dilakukan diawal kontrak agar material sampai di lokasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**Tabel Efisiensi Anggaran**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Relevan (Ya/Tdk)	Penje lasan
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi mantap	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan yang terairi irigasi	a. Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun	1.219.656.592	Ya	
				b. Rehabilitasi/Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun	408.400.000	Ya	
				c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	127.462.000	Ya	
				d. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	3.858.604.000	Ya	
				e. Peningkatan jaringan irigasi yang telah dibangun	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1.293.250.000	Ya	
		Program Pemeliharaan Sungai	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang dibangun	a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang sungai/kali yang dibersihkan/dikeruk	5.929.311.200	Ya	
				b. Perkuatan tebing sungai	Panjang tebing sungai yang diperkuat	11.013.900.000	Ya	

**Sasaran 3**

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi	101,10	97,19	80,59	82,92	80,59
Persentase prasarana MCK yang berfungsi	86,54	96,48	95,09	98,56	95,09
Persentase jaringan drainase dalam keadaan baik	98,95	88,53	88,23	99,66	98,96
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>93,71</b>	<b>91,55</b>

Sumber Data : Dinas PUPR, PDAM

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi adalah sebesar 93,71% yang berarti masuk dalam katagori capaian kinerja **Sangat Tinggi** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi.

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas yang didapat dari data pelanggan PDAM, Pamsimas, data Inventarisasi Air minum dan Sanitasi, dapat dijelaskan bahwa Angka proyeksi perhitungan jumlah jiwa terlayani di PDAM menurun berdasarkan hasil audit BPKP dari 5,5 menjadi 3,7 jiwa/KK, untuk capaian tahun 2019 sebesar 101,10% realisasi tahun 2020 tersebut adalah sebesar 80,59 % dari target sebesar 97,19%, jadi kalau dikurangkan akan menjadi penurunan yaitu (-18,18%), untuk pencapaiannya tahun ini yaitu 82,92%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Tinggi**.

2. Indikator Kinerja Persentase prasarana MCK yang berfungsi.

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas yang didapat dari data Inventarisasi Air Minum dan Sanitasi, dan data Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang mengakses sanitasi sebesar 95,09%, dari target sebesar 96,48%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

3. Indikator Kinerja Persentase jaringan drainase dalam keadaan baik.

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi target atas indikator persentase jaringan drainase dalam keadaan baik tersebut adalah sebesar 88,23% dari target sebesar 88,53%. Dengan rincian panjang jaringan drainase dalam kondisi baik sebesar 111.102 meter dari total panjang jaringan drainase 125.925 meter. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,95% dengan katagori capaian indikator **Sangat Tinggi** dan dibandingkan dengan capaian kinerja 2019 sebesar 98,95% mengalami kenaikan sebesar (0,71%). Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- 1) Rencana kinerja sesuai dengan pagu anggaran
- 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

## Permasalahan/Hambatan

- 1) Curah hujan yang tinggi
- 2) Material berasal dari luar propinsi
- 3) Lahan atau lokasi tempat pekerjaan bermasalah

## Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Mengatur waktu pelaksanaan se efisien mungkin sehingga faktor cuaca dapat di minimalisir
- 2) Pemesanan material dilakukan diawal kontrak agar material sampai di lokasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam hal pembebasan lahan baik dengan masyarakat sekitar pembangunan maupun dengan stakeholder terkait.

**Tabel Efisiensi Anggaran**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Relevan (Ya/Tdk)	Penje lasan
Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase jaringan pipa air minum yang berfungsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih yang layak	a. Pengembangan jaringan perpipaan distribusi air minum	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun	6.517.975.400	Ya	
	Persentase prasarana MCK yang berfungsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase infrastruktur sanitasi yang baik	a. Penyediaan prasarana sanitasi (DAK)	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	2.732.428.000	Ya	
				b. Penyediaan prasarana sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	2.417.550.000	Ya	
				c. Penyediaan sarana sanitasi	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	288.800.000	Ya	
	Persentase jaringan drainase dalam keadaan baik	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase panjang jaringan drainase yang baik	a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	13.679.000.000	Ya	
				b. Rehabilitasi/Peeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	447.750.000	Ya	

#### Sasaran 4

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	95,63	65	64,61	99,4	96,43
Rata-rata Capaian					98,22

Sumber Data : Dinas PUPR

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja adalah sebesar 98,22% yang berarti masuk dalam katagori capaian kinerja **Sangat Tinggi** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti.

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas yang didapat dari data hasil tindaklanjut temuan BPK/Inspektorat dari masing-masing Bidang, bahwa semua sudah ditindaklanjuti tinggal menunggu keputusan selanjutnya, untuk pencapaiannya tahun ini yaitu 100%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

2. Nilai / predikat akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas yang didapat dari data realisasi tahun sebelumnya dikarenakan pada saat penyusunan ini untuk data realisasi tahun berkenaan belum ada nilai penilainnya, dengan realisasi sebesar 64,61% dari target sebesar 65%. Sehingga hasil capaian indikator 96,4% Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- 1) Rencana kinerja sesuai dengan pagu anggaran
- 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

## Permasalahan/Hambatan

- 1) Berubahnya pagu anggaran pada saat pembahasan
- 2) Hasil nilai tahun berkenaan kadang tidak bisa ditampilkan dikarenakan evaluasi tahun berkenaan terlambat dilaksanakan

## Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- 1) Menyesuaikan pagu dengan hasil pembahasan sehingga rencana kerja dapat tercapai
- 2) Mengharapkan agar hasil evaluasi penilaian adalah nilai tahun sebelumnya sebagai realisasi, karena untuk nilai tahun berkenaan menunggu laporan ini dibuat dulu baru dievaluasi.

Tabel Efisiensi Anggaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Relevan (Ya/Tdk)	Penjelasan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Persentase temuan BPK/Inspektoral yang ditindak lanjuti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD	1.576.906.500	Ya	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	2.735.390.000	Ya	
	Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat	84.500.000	Ya	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kemampuan sumber daya OPD	335.634.500	Ya	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan keuangan SOPD sesuai SAP	362.500.000	Ya	

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk sesuai Ketentuan dan Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, memiliki fungsi :

- a. Permusan kebijakan dibidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan



utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi kualifikasi dan registrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta memperhatikan dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.

b. Bidang Sumber Daya Air

Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian.

c. Bidang Cipta Karya

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Balangan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Balangan yang merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan

kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Penataan Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang kabupaten belum bisa mengoptimalkan agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Disamping itu sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan dan kawasan permukiman (air bersih layak, sanitasi aman, prasarana sarana utilitas umum perumahan, pengelolaan persampahan, kawasan kumuh) dan masih tingginya rumah tidak layak huni.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema yang dipilih untuk pembangunan tahun 2021 adalah **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh

masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan akan melaksanakan 13 Program 24 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Lembar .....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				201.938.869.322	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				201.938.869.322	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				183.746.924.872	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				183.746.924.872	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip SKPD	65,50	11.259.712.656	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip SKPD	65,50	11.259.712.656	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dokumen	25.360.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dokumen	25.360.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 dokumen	25.360.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 dokumen	25.360.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	7.821.869.756	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	7.821.869.756	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	14 bulan	7.666.365.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	14 bulan	7.666.365.900	
3	Pelaksanaan Penatousahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	12 bulan	5.003.856	Pelaksanaan Penatousahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	12 bulan	5.003.856	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	3 dokumen	150.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	3 dokumen	150.500.000	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	405.713.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	405.713.000	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 stel	112.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 stel	112.500.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	293.213.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	293.213.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	12 bulan	1.336.411.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	12 bulan	1.336.411.600	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 buah	8.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 buah	8.450.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 bulan	44.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 bulan	44.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	288.911.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	288.911.600	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12.000.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	983.050.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	983.050.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	982.638.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	982.638.800	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	610.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	610.800.000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	371.838.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	371.838.800	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	687.719.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	687.719.500
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	407.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	407.630.000
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	51.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	51.500.000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 buah	228.589.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 buah	228.589.500
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	24,20	9.254.410.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	24,20	9.254.410.000
			Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41				Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41	
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41%	6.811.450.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41%	6.811.450.000
17	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	1 dokumen	100.000.000
18	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	2 ha	600.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	2 ha	600.000.000
19	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	750 meter	5.526.100.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	750 meter	5.526.100.000
20	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	1 buah	124.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	1 buah	124.000.000
21	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	12 berkas	461.350.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	12 berkas	461.350.000

8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	24,2%	2.442.960.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	24,2%	2.442.960.000	
22	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	500 meter	950.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	500 meter	950.000.000	
23	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bendung Irigasi yang direhabilitasi	2 buah	300.000.000	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bendung Irigasi yang direhabilitasi	2 buah	300.000.000	
24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 lokasi	985.700.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 lokasi	985.700.000	
25	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2 lokasi	207.260.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2 lokasi	207.260.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82,27	200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82,27	200.000.000	
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	
26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik	92,4%	1.969.406.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	92,4%	1.969.406.000	
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	14,07%	1.969.406.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	14,07%	1.969.406.000	
27	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	140 unit	1.749.406.000	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	140 unit	1.749.406.000	
28	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1 unit	220.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1 unit	220.000.000	

5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,49	11.845.539.912	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,49	11.845.539.912
11	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik		Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	5 unit	11.845.539.912	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik		Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	5 unit	11.845.539.912
29	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	7 unit	7.972.010.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	7 unit	7.972.010.000
30	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Monitoring	1 dokumen	154.007.912	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Monitoring	1 dokumen	154.007.912
31	Rehabilitasi, Renovasi dan Urahan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan gedung yang direhab	3 unit	3.719.522.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Urahan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan gedung yang direhab	3 unit	3.719.522.000
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Jumlah bangunan yang ditata	1 buah	1.631.072.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Jumlah bangunan yang	1 buah	1.631.072.000
12	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan yang ditata	1 unit	1.631.072.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan yang	1 unit	1.631.072.000
32	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	1 unit	1.631.072.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan yang di p	1 unit	1.631.072.000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan dalam kondisi mantap	62,91	146.086.784.304	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan dalam kondisi mantap	62,91	146.086.784.304
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	80,06				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	80,06	
13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan dalam kondisi mantap	39 Km	146.086.784.304	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan dalam kondisi mantap	39 Km	146.086.784.304
33	Rekonstruksi Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di rekonstruksi	38,57 Km	123.843.640.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di rekonstruksi	38,57 Km	123.843.640.000
34	Rehabilitasi Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di rehabilitasi	0,8 Km	7.048.500.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di rehabilitasi	0,8 Km	7.048.500.000
35	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	0,25 meter	876.600.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	0,25 meter	876.600.000
36	Pembangunan Jembatan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jembatan yang dibangun	182 meter	13.968.044.304	Pembangunan Jembatan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jembatan yang dibangun	182 meter	13.968.044.304
37	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	50 meter	350.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	50 meter	350.000.000



8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUIK yang dibina	50	500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUIK yang dibina	50	500.000.000
14	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	250.003.928	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	250.003.928
38	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	100 orang	250.003.928	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	100 orang	250.003.928
15	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUIK	30 IUJK	249.996.072	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUIK	30 IUJK	249.996.072
39	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	30 Rekomendasi	28.011.072	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	30 Rekomendasi	28.011.072
40	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	30 orang	221.985.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	30 orang	221.985.000
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	42	1.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	42	1.000.000.000
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana tata ruang	9 dokumen	400.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana tata ruang	9 dokumen	400.000.000
41	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	3 dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	3 dokumen	400.000.000
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	3 dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	3 dokumen	200.000.000
42	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bahan informasi penataan ruang	3 dokumen	200.000.000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bahan informasi penataan ruang	3 dokumen	200.000.000
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	4 dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	4 dokumen	400.000.000
43	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	2 dokumen	400.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	2 dokumen	400.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.191.944.450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.191.944.450
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	816.406.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	816.406.000
19	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dokumen	163.510.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dokumen	163.510.000
44	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	163.510.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	163.510.000

20	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15 unit	652.896.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15 unit	652.896.000
45	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	10 unit	343.619.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	10 unit	343.619.000
46	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	5 unit	309.277.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	5 unit	309.277.000
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	78,49%	1.405.942.450	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	78,49%	1.405.942.450
21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100%	220.218.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	100%	220.218.000
47	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	220.218.000	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	220.218.000
22	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		luas kawasan kumuh yang tertangani	2, 1 ha	1.185.724.450	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		luas kawasan kumuh yang tertangani	2, 1 ha	1.185.724.450
48	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang drainase dibangun	284 M2	1.185.724.450	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang drainase dibangun	284 M2	1.185.724.450
Panjang jalan yang dibangun			269 M2	Panjang jalan yang dibangun				269 M2		
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	467.609.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	467.609.000
23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	95%	467.609.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	95%	467.609.000
49	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	20 unit	467.609.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	20 unit	467.609.000
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85%	15.501.987.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85%	15.501.987.000
24	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100%	15.501.987.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100%	15.501.987.000
50	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	1 dokumen	130.325.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	1 dokumen	130.325.000
51	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	160 unit	15.371.662.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	160 unit	15.371.662.000

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam penyusunan renja ini dapat bersumber dari usulan SOPD, dari masukan pihak legislatif ( DPRD ) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan program dan kegiatan tersebut dibahas dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Tidak ada usulan masyarakat dalam Musrenbang untuk tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

Tabel T-C.32.  
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...  
 Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
 Nama Perangkat Daerah : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

- a. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
- c. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi

- d. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
- e. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;
- f. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
- g. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2022 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, 2019 serta 2020 terutama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2022 terkait dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masuk di dalam misi pertama yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana

pembangunan. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2022 yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan merencanakan akan melaksanakan 13 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 24 kegiatan 51 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 201.938.869.322,-, terdiri dari belanja langsung.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur publik	Indeks Infrastruktur Urusan Ke PUPR	29,40	32,25	34,64	36,77	39,04	40,76
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur urusan perumahan dan permukiman	13,71	14,18	14,55	15,01	15,38	15,64

### 3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan



- Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
  - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
  - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
    - Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
    - Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
  - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
    - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

## 11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

## 12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

## 13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Tabel T-C.33.									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021									
Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan									
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									
lembar ..... dari .....									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				201.938.869.322				222.132.756.254
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				183.746.924.872				202.121.617.359
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		65,50	11.259.712.656			66	12.385.683.922
1 03 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		2 dokumen	25.360.000			2 dokumen	27.896.000
1 03 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	25.360.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 dokumen	27.896.000

1	03	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan		14 bulan	7.821.869.756			14 bulan	8.604.056.732
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan	7.666.365.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	14 bulan	8.433.002.490
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.003.856	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	5.504.242
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	150.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 dokumen	165.550.000
1	03	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur			100%	405.713.000		100%	446.284.300
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 stel	112.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	150 stel	123.750.000
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	293.213.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	50 orang	322.534.300
1	03	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan			12 bulan	1.336.411.600		12 bulan	1.470.052.760
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 buah	8.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 buah	9.295.000
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	44.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	48.400.000
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	288.911.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	317.802.760
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	13.200.000
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	983.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	1.081.355.000
1	03	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD			100%	982.638.800		100%	1.080.902.680
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	610.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	671.880.000
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	371.838.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	409.022.680

1	03	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD		100%	687.719.500			100%	756.491.450
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	407.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	448.393.000
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	51.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	56.650.000
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 buah	228.589.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5 buah	251.448.450
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		24,20	9.254.410.000		28,31	10.179.851.000
						Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		12,41			13,03	
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		12,41%	6.811.450.000		12,41%	7.492.595.000
1	03	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	110.000.000
1	03	02	2,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 ha	600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 ha	660.000.000
1	03	02	2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 meter	5.526.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	750 meter	6.078.710.000
1	03	02	2,01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 buah	124.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 buah	136.400.000
1	03	02	2,01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 berkas	461.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 berkas	507.485.000
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		24,2%	2.442.960.000		24,2%	2.687.256.000
1	03	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 meter	950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	500 meter	1.045.000.000
1	03	02	2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Bendung Irigasi yang direhabilitasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 buah	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 buah	330.000.000
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 lokasi	985.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 lokasi	1.084.270.000
1	03	02	2,02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	207.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 lokasi	227.986.000

1	03	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		82,27	<b>200.000.000</b>			83,27	<b>220.000.000</b>
1	03	03	2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				<b>200.000.000</b>				<b>220.000.000</b>
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			200.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		<b>220.000.000</b>
1	03	05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik		92,75	<b>1.969.406.000</b>			93,76	<b>2.166.346.600</b>
1	03	05	2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak		14,07%	<b>1.969.406.000</b>			14,07%	<b>2.166.346.600</b>
1	03	05	2,01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun		140 unit	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	140 unit	1.924.346.600
1	03	05	2,01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia		1 unit	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 unit	242.000.000
1	03	08		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik		89,49	<b>11.845.539.912</b>			89,60	<b>13.030.093.903,20</b>
1	03	08	2,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara		5 unit	<b>11.845.539.912</b>			5 unit	<b>13.030.093.903,20</b>
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun		7 unit	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7 unit	8.769.211.000,00
1	03	08	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Monitoring		1 dokumen	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	169.408.703,20
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhab		3 unit	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 unit	4.091.474.200,00
1	03	09		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Jumlah Bangunan yang ditata		1 buah	<b>1.631.072.000</b>			1 buah	<b>1.794.179.200</b>
1	03	09	2,01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata		1 unit	<b>1.631.072.000</b>			1 unit	<b>1.794.179.200</b>
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara		1 unit	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 unit	1.794.179.200

1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Jalan dalam kondisi mantap		62,91				70,51	160.695.462.734
						Persentase Jembatan dalam kondisi baik		80,06		146.086.784.304		82,08	
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap		39 Km		146.086.784.304		39 Km	160.695.462.734
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.57 Km		123.843.640.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	38.57 Km	136.228.004.000
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 Km		7.048.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0,8 Km	7.753.350.000
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,25 meter		876.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0,25 meter	964.260.000
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182 meter		13.968.044.304	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	182 meter	15.364.848.734
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 meter		350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	50 meter	385.000.000
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		50		500.000.000		60	550.000.000
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat		100 orang		250.003.928		100 orang	275.004.321
1	03	11	2,01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang		250.003.928	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 orang	275.004.321
1	03	11	2,03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUK		30 IUJK		249.996.072		30 IUJK	274.995.679
1	03	11	2,03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Rekomendasi		28.011.072	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	30 Rekomendasi	30.812.179
1	03	11	2,03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang		221.985.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	30 orang	244.183.500
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		42		1.000.000.000		56	1.100.000.000
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang		9 dokumen		400.000.000		9 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen		400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang		3 dokumen		200.000.000		3 dokumen	220.000.000
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah bahan informasi penataan ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen		200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 dokumen	220.000.000
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi pengendalian pemanfaatan ruang		4 dokumen		400.000.000		4 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen		400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 dokumen	440.000.000

1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.191.944.450				20.011.138.895
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100%	816.406.000			100%	898.046.600
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana		1 dokumen	163.510.000			1 dokumen	179.861.000
1	04	02	2,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	163.510.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	179.861.000
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun		15 unit	652.896.000			15 unit	718.185.600
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	343.619.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10 unit	377.980.900
1	04	02	2,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	309.277.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5 unit	340.204.700
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani		78,49	1.405.942.450			84,78	1.546.536.695
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha		100%	220.218.000			100%	242.239.800
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	220.218.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	242.239.800
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani		2, 1 ha	1.185.724.450				1.304.296.895
1	04	03	2,03	03	KERJA SAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU	Panjang drainase dibangun Panjang jalan yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284 M2 269 M2	1.185.724.450		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	284 M2 269 M2	1.304.296.895
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		95%	467.609.000			95%	514.369.900
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab		95%	467.609.000			95%	514.369.900
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	467.609.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20 unit	514.369.900
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		85%	15.501.987.000			87%	17.052.185.700
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan		100%	15.501.987.000			100%	17.052.185.700
1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	130.325.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	143.357.500
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 unit	15.371.662.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	160 unit	16.908.828.200
									201.938.869.322				222.132.756.254



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2022 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan diarahkan pada :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
  - Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
  - Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
  - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
  - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa

Konstruksi

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

### 13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Tabel T-C.33.											
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021											
Provinsi/Kabupaten/Kota Balangan											
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman											
lembar ..... dari .....											
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			201.938.869.322			222.132.756.254	
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			183.746.924.872			202.121.617.359	
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		65,50	11.259.712.656		66	12.385.683.922
1	03	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		2 dokumen	25.360.000		2 dokumen	27.896.000
1	03	01	2,01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	25.360.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 dokumen	27.896.000
1	03	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan		14 bulan	7.821.869.756		14 bulan	8.604.056.732
1	03	01	2,02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan	7.666.365.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	14 bulan	8.433.002.490
1	03	01	2,02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.003.856	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	5.504.242
1	03	01	2,02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	150.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 dokumen	165.550.000

1	03	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%	405.713.000		100%	446.284.300	
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 stel	112.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	150 stel	123.750.000
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	293.213.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	50 orang	322.534.300
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan		12 bulan	1.336.411.600		12 bulan	1.470.052.760
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 buah	8.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 buah	9.295.000
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	44.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	48.400.000
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	288.911.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	317.802.760
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	13.200.000
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	983.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	1.081.355.000
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD		100%	982.638.800		100%	1.080.902.680
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	610.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	671.880.000
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	371.838.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	409.022.680
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD		100%	687.719.500		100%	756.491.450
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	407.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	448.393.000
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	51.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 bulan	56.650.000
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 buah	228.589.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5 buah	251.448.450
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		24,20	9.254.410.000		28,31	10.179.851.000
						Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		12,41			13,03	
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		12,41%	6.811.450.000		12,41%	7.492.595.000
1	03	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 dokumen	110.000.000
1	03	02	2,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 ha	600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 ha	660.000.000
1	03	02	2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 meter	5.526.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	750 meter	6.078.710.000
1	03	02	2,01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 buah	124.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 buah	136.400.000
1	03	02	2,01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 berkas	461.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 berkas	507.485.000

1	03	02	2,02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		24,2%	2.442.960.000			24,2%	2.687.256.000	
1	03	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 meter	950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		500 meter	1.045.000.000
1	03	02	2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Bendung Irigasi yang direhabilitasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 buah	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 buah	330.000.000
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 lokasi	985.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 lokasi	1.084.270.000
1	03	02	2,02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	207.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 lokasi	227.986.000
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		82,27	200.000.000			83,27	220.000.000
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000				220.000.000
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			220.000.000
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik		92,75	1.969.406.000			93,76	2.166.346.600
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak		14,07%	1.969.406.000			14,07%	2.166.346.600
1	03	05	2,01	06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 unit	1.749.406.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		140 unit	1.924.346.600
1	03	05	2,01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	220.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	242.000.000
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik		89,49	11.845.539.912			89,60	13.030.093.903,20
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara		5 unit	11.845.539.912			5 unit	13.030.093.903,20
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	7.972.010.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 unit	8.769.211.000,00
1	03	08	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Monitoring	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	154.007.912	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dokumen	169.408.703,20
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhab	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3.719.522.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 unit	4.091.474.200,00
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Jumlah Bangunan yang ditata		1 buah	1.631.072.000			1 buah	1.794.179.200
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata		1 unit	1.631.072.000			1 unit	1.794.179.200
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1.631.072.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	1.794.179.200

1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Jalan dalam kondisi mantap		62,91				70,51	160.695.462.734
						Persentase Jembatan dalam kondisi baik		80,06				82,08	
									146.086.784.304				
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap		39 Km	146.086.784.304			39 Km	160.695.462.734
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.57 Km	123.843.640.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		38.57 Km	136.228.004.000
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 Km	7.048.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0,8 Km	7.753.350.000
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,25 meter	876.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0,25 meter	964.260.000
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182 meter	13.968.044.304	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		182 meter	15.364.848.734
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 meter	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 meter	385.000.000
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		50	500.000.000			60	550.000.000
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat		100 orang	250.003.928			100 orang	275.004.321
1	03	11	2,01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	250.003.928	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 orang	275.004.321
1	03	11	2,03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUIK		30 IUIK	249.996.072			30 IUIK	274.995.679
1	03	11	2,03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUIK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUIK yang diterbitkan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Rekomendasi	28.011.072	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30 Rekomendasi	30.812.179
1	03	11	2,03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	221.985.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30 orang	244.183.500
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		42	1.000.000.000			56	1.100.000.000
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang		9 dokumen	400.000.000			9 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang		3 dokumen	200.000.000			3 dokumen	220.000.000
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah bahan informasi penataan ruang	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 dokumen	220.000.000
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		4 dokumen	400.000.000			4 dokumen	440.000.000
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 dokumen	440.000.000



1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.191.944.450				20.011.138.895	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			100%	816.406.000			100%	898.046.600
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana			1 dokumen	163.510.000			1 dokumen	179.861.000
1	04	02	2,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	163.510.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dokumen	179.861.000
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun			15 unit	652.896.000			15 unit	718.185.600
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit	343.619.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 unit	377.980.900
1	04	02	2,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit	309.277.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 unit	340.204.700
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani			78,49	1.405.942.450			84,78	1.546.536.695
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha			100%	220.218.000			100%	242.239.800
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	220.218.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dokumen	242.239.800
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani			2,1 ha	1.185.724.450				1.304.296.895
1	04	03	2,03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Panjang drainase dibangun	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		284 M2	1.185.724.450	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		284 M2	1.304.296.895
						Panjang jalan yang dibangun			269 M2				269 M2	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			95%	467.609.000			95%	514.369.900
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab			95%	467.609.000			95%	514.369.900
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit	467.609.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 unit	514.369.900
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU			85%	15.501.987.000			87%	17.052.185.700
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan			100%	15.501.987.000			100%	17.052.185.700
1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	130.325.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dokumen	143.357.500
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160 unit	15.371.662.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		160 unit	16.908.828.200
										201.938.869.322				222.132.756.254

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan. Semoga RENJA tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

### **Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian**

Uraian rencana program/ kegiatan serta sub kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2022 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Balangan.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2022 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing perangkat daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

### **Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Balangan dan Renstra Dinas).

### **Rencana Tindak Lanjut**

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu

pekerjaan pada seseorang

- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Paringin,                      September 2021

**PIL KEPALA DINAS**

**PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**



RAHMADIAH, ST, MT

Pembina/ IVa

NIP. 19760309 200604 2 007